

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Standar akuntansi yang digunakan oleh beberapa perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar ini mengalami beberapa revisi didasarkan pada penyesuaian standar yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi setiap waktunya. Hal ini mengakibatkan DSAK harus melakukan penyesuaian berupa revisi standar bahkan penambahan dan penghapusan standar (Casnila & Nurfitriana, 2020).

Pada tahun 2017 IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSA)K) merilis tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru diantaranya PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan mengacu pada IFRS 9, PSAK 72 mengenai Pendapatan dari Kontrak dengan Konsumen mengacu pada IFRS 15 dan PSAK 73 mengatur tentang Sewa mengacu pada IFRS16.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi IFRS sejak tahun 2012 maka Indonesia harus mengikuti pergerakan standar yang berlaku Internasional. Hal ini dilakukan supaya informasi yang dihasilkan relevan dan bisa dibaca oleh *stakeholders* domestik maupun asing. Ketiga standar tersebut akan efektif digunakan di Indonesia per 1 Januari 2020 sehingga emiten dipaksa harus menerapkan standar tersebut tahun depan

Standar baru ini mengubah pendapatan kontrak berawal dari (*rule based*) menjadi (*principle based*). PSAK 72 ini pengakuan pendapatannya dilaksanakan secara berangsur-angsur panjang sesuai umur kontrak (*over the time*) ataupun pada titik tertentu (*at a point of time*).

PSAK 72 untuk mengakui pendapatan harus menganalisa 5 model tahapan yaitu mengidentifikasi kontrak, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan,

menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan (Agustrianti, Saputri Mashuri, & Nopiyanti, 2020).

PSAK 72 ini menggantikan PSAK 23 untuk digunakan semua industri tetapi tidak semua industri transaksi sederhana secara mudah untuk menerapkan lima tahapan standar baru ini (Wisnantiasri, 2018). Selain itu standar baru ini juga memberikan informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih transparan maka membuat kinerja keuangan suatu perusahaan terlihat dan para investor akan mengetahui kinerja perusahaan. Dengan adanya perubahan standar baru ini yaitu PSAK 72 mengenai pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengubah model pengakuan pendapatan berpengaruh besar atas laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dikarenakan laporan laba rugi menggambarkan kesanggupan perusahaan dalam memperoleh laba.

Penelitian ini akan fokus pada penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari Kontrak dengan Konsumen. PSAK 72 memiliki perbedaan dalam mengakui pendapatan dengan PSAK sebelumnya. Jika awalnya pendapatan diakui bersifat *rule based* dimana pengakuannya bersifat kaku sedangkan berdasarkan standar yang baru pendapatan diakui dengan prinsip (*principle based*). Standar baru mengatur bahwa pendapatan diakui bukan sejumlah penerimaan uang muka, melainkan berdasarkan kewajiban kontrak yang sudah diberikan oleh suatu entitas kepada pelanggannya sesuai dengan kontak yang sudah disepakati. Pendapatan yang diakui bisa dilakukan secara bertahap sesuai umur kontrak yang disepakati atau pada titik tertentu.

Untuk pengakuan pendapatan yang dilakukan bertahap harus memenuhi persyaratan tertentu diantaranya adanya peningkatan aset yang diterima oleh pelanggan pemenuhan kewajiban yang sudah dilakukan oleh suatu entitas atas suatu kontrak tertentu. Jika belum memenuhi syarat tersebut maka

pendapata baru bisa diakui setelah adanya penyerahan aset (*at a point of time*) (Nurfitriana, 2020).

Penerapan PSAK 72 yang memiliki perbedaan dengan PSAK 23 menyebabkan adanya perbedaan pengakuan dalam transaksi dan penyajian di laporan keuangan. Ketika ada transaksi yang berhubungan dengan kontrak maka disana berhubungan dengan pengakuan kewajiban yang harus dipenuhi.

Sektor yang akan terpengaruh penerapan standar ini yaitu ritel, telekomunikasi, konstruksi, manufaktur, penerbangan, dan pengembang. Salah satu contoh Perusahaan yang sudah mulai menerapkan PSAK 72 adalah PT. Telekomunikasi Indonesia per 1 Januari 2018. Dalam penerapannya, PT. Telekomunikasi Indonesia mengalami kendala dalam mereview ribuan kontrak karena harus mengenali semua kontrak yang ada sebelum mengakuinya sebagai pendapatan karena banyaknya persyaratan yang ditetapkan dalam psak 72 dalam pengakuan pendapatan.

Pengimplementasian PSAK 72 di masa Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi para pemilik usaha, salah satunya adalah perusahaan telekomunikasi, meskipun tidak signifikan (Hidayat, 2016). Dampak perlu diwaspadai adalah laporan keuangan padatahun 2020, hal tersebut disebabkan adanya perlambatan ekonomi karena pandemi Covid-19

Perlambatan tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan telekomunikasi untuk tetap survive yakni ketika pengakuan pendapatan saat melakukan kontrak dengan pelanggan perusahaan telekomunikasi harus menyusun strategi dengan mengklasifikasikan kontrak mana yang dapat diakui dan di catat secara cepat dan akurat. Kemudian tantangan berikutnya bagi perusahaan adalah melakukan review dan evaluasi seluruh kontrak yang adakarna harus mempelajari semua sebelum melaksanakan pengakuan pendapatan untuk menyesuaikan dengan

ketentuan PSAK72 yang cukup banyak dalam pengakuan pendapatan (Casnila dan Nrfitriana,2020).

Perusahaan mengakui pendapatan saat pendapatan tersebut telah direalisasikan pada saat atau telah diterima atau didapatkan. Akun terpenting dalam laporan keuangan yaitu pendapatan dikarenakan akun ini memberikan informasi dan menilai kinerja suatu perusahaan selain itu menjadi daya Tarik untuk para investor yang dijual ke publik dengan melewati saham yang dijual perusahaan.

Pendapatan diakui dengan seharusnya saat pendapatan sangat besar maupun kecil akan menyebabkan data dalam laporan laba rugi untuk pengambilan keputusan bagi pihak manajemen (Musadi, Karamoy, & Gamaliel, 2017). Kemudian ketika kewajiban tersebut sudah dilakukan maka transaksi tersebut akan berhubungan dengan pengakuan pendapatan yang nantinya akan dilaporkan di aset serta penambah modal ditahan sampai ke penambahan modal. Dengan demikian, jika terdapat perbedaan antara PSAK 23 dengan PSAK 72 maka hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan suatu entitas yang tersaji di laporan keuangan tersebut.

Menurut Suwardjono (2016), pendapatan bersama biaya merupakan komponen dalam laporan laba rugi suatu emiten yang akan membentuk laba perusahaan dan merupakan penyebab perubahan ekuitas dari kegiatan operasi. Informasi laba digunakan sebagai salah satu ukuran untuk penilaian kinerja serta dasar untuk penghitungan ukuran lainnya, seperti rasio keuangan (IAI, 2017). Informasi dalam pelaporan keuangan disediakan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya untuk pengambilan keputusan ekonomik (SFAC 8). Dengan demikian, informasi tersebut harus relevan dan tepat disajikan supaya bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan bagi para penggunanya

Penelitian sebelumnya oleh Herliana et al. (2018) bahwa penerapan PSAK 72 (2017) pada industri telekomunikasi berdampak pada perpajakan berupa perbedaan yang bersifat temporer dalam pengakuan pendapatan dan biaya kontrak, time value of money dari beban pajak yang dibayarkan, , potensi penerimaan pajak lebih besar pada awal tahun saat penerapan PSAK 72 (2017) yang dilakukan oleh entitas

Kontrak merupakan perjanjian antara lebih dari satu pihak yang mewajibkan timbulnya hak dan kewajiban. Perlu diketahui bahwa variasi sifat kontrak yang beragam sebagaimana diatur dalam kontrak dimana terkadang memiliki periode waktu yang tidak sesuai maupun berakhir atau dimodifikasi oleh salah satu pihak setiap saat, serta dapat diperbarui otomatis secara periodik.

Mengingat PSAK 72 (2017) ditujukan terhadap durasi kontrak berupa periode kontraktual, yakni mewajibkan para pihak dalam kontrak memiliki hak dan kewajiban, kemudian sesuai maksud dan tujuan dalam pernyataan standar akuntansi bahwa kontrak tidak terjadi apabila secara sepihak satu pihak dalam kontrak mempunyai hak mendesak untuk menghentikan kontrak yang tak terlaksana secara penuh.

Kontrak dengan pelanggan merupakan bentuk pengalihan barang atau jasa dari entitas kepada pelanggan sesuai dengan yang telah disepakati. Untuk kewajiban pelaksanaan sendiri, barang atau jasa dideskripsikan bahwa tidak hanya sesuai dengan yang secara eksplisit terdapat pada kontrak dan tidak termasuk dalam ruang lingkup kegiatan yang wajib dilakukan entitas untuk memenuhi suatu kontrak, contohnya tugas administratif yang dilakukan untuk menyusun suatu kontrak bukan Perihal kewajiban pelaksanaan, hal ini tidak hanya sesuai dengan deskripsi yang secara eksplisit terdapat dalam kontrak,

tetapi disesuaikan juga dengan janji tersirat pada saat menyepakati kontrak, dimana janji tersebut memunculkan ekspektasi tinggi dari pelanggan bahwa entitas akan mengalihkan barang atau jasanya.

Ghaniy (2018) menyatakan perbandingan antara pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 dan standar sebelumnya berikut bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan salah satunya dalam sektor bisnis. Sedangkan Penelitian Casnila dan Nurfitriana (2020) yang menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya terdapat perbedaan dampak perubahan penilaian kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 pada perusahaan telekomunikasi yang terlisting di Bursa Efek Indonesia.

Ghaniy (2018) menyatakan perbandingan antara pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 dan standar sebelumnya berikut bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan salah satunya dalam sektor bisnis. Sedangkan Penelitian Casnila dan Nurfitriana (2020) yang menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya terdapat perbedaan dampak perubahan penilaian kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 pada perusahaan telekomunikasi yang terlisting di Bursa Efek Indonesia. Informasi pendapatan digunakan untuk menilai posisi dan kinerja keuangan perusahaan serta membandingkannya dengan perusahaan lain (IASB, 2014).

Kinerja keuangan merupakan prestasi kerja yang dilaksanakan entitas perusahaan dan dapat dilihat dalam laporan keuangan (Kurniasari, 2014). Kinerja keuangan merupakan analisis yang difungsikan untuk melakukan pengukuran kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan berdasarkan ketentuan yang ada (Fahmi, 2012).

Kinerja keuangan berdasarkan penelitian dilakukan pengukuran melalui CR (*current ratio*), DER (*debt to equity ratio*), NPM (*net profit margin*) dan

ROA (*Return On Asset*). CR (*current ratio*) adalah indikator yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan perusahaan untuk melakukan pelunasan pada liabilitas lancar dengan tepat waktu. DER (*debt to equity ratio*) adalah indikator yang difungsikan untuk melakukan penilaian melalui perbandingan total liabilitas dengan totalekuitas perusahaan. NPM (*net profit margin ratio*) adalah indikator yang difungsikan untuk melakukan pengukuran laba setelah interest (bunga) dan tax (pajak) yang didapatkan disandingkan dengan total penjualannya (Kasmir, 2015).

ROA (*Return On Asset*) adalah indikator yang difungsikan untuk melakukan penilaian melalui perbandingan laba setelah pajak dibandingkan dengan Total asset. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **ANALISIS PENERAPAN PENGAKUAN PENDAPATAN SEBELUM DAN SESUDAH PSAK 72 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN** (studi kasus pada perusahaan Manufactur sektor Pertambangan, Industri dasar dan Kimia yang sudah menerapkan PSAK 72 yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019 - 2021).

1.2 Identifikasi, Pembatasan, Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah skripsi ini sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Perubahan pengakuan pendapatan sebelum dan sesudah PSAK 72.
2. Dampak pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 23 dan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sector Pertambangan industry dasar dan sector kimia di Bursa Efek Indonesia.

3. Mendigentifikasi Penerapan PSAK 72 pada kinerja keuangan perusahaan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan waktu, data, dan tenaga dan lainnya, maka pembahasan dalam skripsi ini dibatasi hanya pada masalah dampak penerapan sebelum dan sesudah PSAK 72 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sector pertambangan, industry dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021.

1.3 Rumusan Masalah.

1. Apakah terdapat perbedaan ROA sebelum dan sesudah penerapan pengakuanpendapatan berdasarkan PSAK 72?
2. Apakah terdapat perbedaan NPM sebelum dan sesudah penerapan pengakuanpendapatan berdasarkan PSAK 72?
3. Apakah terdapat perbedaan DER sebelum dan sesudah penerapan pengakuan pendapatan sebelum dan sesudah PSAK 72?
4. Apakah terdapat perbedaan CR sebelum dan sesudah penerapan pengakuanpendapatan berdasarkan PSAK 72?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan ROA sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 72.
2. untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan NPM sebelum dan sesudah PSAK72
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan DER sebelum dan sesudah PSAK72
4. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan CR sebelum dan sesudah PSAK72

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis dalam bidang penelitian dan sebuah perbandingan antara teori-toeri yang didapat selama duduk di bangku kuliah Manfaat praktis.
2. Bagi Akademis, dapat menjadi referensi untuk mengetahui pengungkapan pendapatan berdasarkan PSAK sebelum dan sesudah PSAK 72 sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berkolerasi dengan penelitian ini.
3. Bagi perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam hal Pengakuan Pendapatan sesuai PSAK sebelum dan sesudah dan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

